

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkhususnya tentang retribusi IMB, sudah diterapkan dan dijalankan secara baik oleh DPMPTSP Kabupaten Alor namun belum memberikan hasil secara maksimal atau belum sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain seperti kurangnya personil dan rendahnya sumber daya aparatur, kurangnya pengawasan pembangunan, belum memiliki database IMB, kurangnya sosialisasi, kurang tegas sanksi dari pemerintah, kondisi dan letak kantor yang kurang strategis. Sedangkan faktor eksternal seperti tim teknis yang bertugas pada satuan kerja masing-masing, kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat serta kondisi geografis kabupaten Alor.
2. Kontribusi retribusi IMB terhadap peningkatan PAD Kabupaten Alor meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya namun persentasi kontribusinya masih sangat kurang karena hanya mampu menyumbang 0,37% dari total penerimaan PAD selama tahun 2015 – 2017.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis guna menciptakan aparaturnya yang handal dan memahami tugasnya;
2. Adanya pendataan menyangkut kepemilikan dokumen IMB di masyarakat;
3. Membangun kerjasama yang baik sampai tingkat RT sehingga memudahkan dalam kegiatan pengawasan pembangunan di masyarakat;
4. Dapat bertindak tegas dalam memberikan sanksi sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung, apabila ada kegiatan membangun tanpa IMB yang dilakukan masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera.
5. Melakukan sosialisasi yang lebih khusus tentang IMB, manfaat dan sanksi-sanksinya sampai tingkat akar rumput sehingga terciptanya masyarakat yang sadar IMB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Deddy, Dadang. (2004). *Otonomi Penyelenggara Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Hatta. (2005). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Gowa*. Tesis Uनेversitas Hasanuddin. Makassar.
- Jayadi Setiabudi. (2012). *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*. Cetakan 1. Yogyakarta : Buku Pintar.
- Kaho. (2005). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Koesoemahatmaja. (1979). *Pengantar Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi*
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung*.

- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/ 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.*
- Lembaran Daerah Kabupaten Alor. *Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung.*
- Lembaran Daerah Kabupaten Alor. *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Alor.*
- Lembaran Daerah Kabupaten Alor. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Lembaran Daerah Kabupaten Alor. *Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.*
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2009 *Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Alor.*
- Peraturan Bupati Alor Nomor 16 Tahun 2011 *Tentang Standar Operasional Dan Prosedur penyelenggaraan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Alor.*
- Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2017 *Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengurusan Dan Penandatanganan Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Dari Bupati Alor Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Alor.*
- Prins.Kosim Adisapoetra.(1983). *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rasyid. (2005). *Analisis Kemampuan Pemerintah Kota Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Tesis Uneversitas Hasanuddin. Makassar.*